



**PERNYATAAN SIKAP  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
ATAS KASUS KEKERASAN TERHADAP PENYIDIK KPK  
NOVEL BASWEDAN**

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan salah satu lembaga negara yang lahir dari rahim reformasi. Pembentukan KPK didasari atas fenomena korupsi di Indonesia yang semakin meluas dan sistematis menggurita di semua sektor. Pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan hingga saat ini belum berjalan secara efektif dan efisien, sehingga KPK masih menjadi harapan publik untuk menjadi *trigger mechanism* dalam pemberantasan korupsi. Kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi telah nampak dari keberhasilannya dalam mengungkap beberapa skandal mega korupsi yang menyeret oknum-oknum pada kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam pengungkapan tersebut, tidak jarang ada upaya-upaya untuk melemahkan KPK, baik melalui *judicial review* UU KPK, revisi UU KPK, kriminalisasi, maupun teror dalam berbagai bentuknya.

Pada Selasa, 11 April 2017, salah seorang penyidik senior KPK Novel Baswedan, mengalami kekerasan oleh orang yang belum diketahui identitasnya. Bagi publik rasanya sulit untuk tidak menghubungkan tindak kekerasan tersebut dengan tugas Novel Baswedan sebagai penyidik KPK, terlebih lagi saat ini Novel Baswedan sedang terlibat dalam penanganan korupsi e-KTP yang diduga kuat melibatkan para penguasa dan mantan penguasa di negeri ini. Berkaitan dengan hal ini, maka Universitas Islam Indonesia (UII) terpanggil untuk menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut:

1. Mendesak Kepolisian Republik Indonesia untuk segera mengungkap pelaku beserta motif tindak kekerasan yang dilakukan terhadap Novel Baswedan.
2. Mendorong Presiden Republik Indonesia untuk mengawal proses pengungkapan kasus kekerasan yang dilakukan terhadap Novel Baswedan agar berjalan secara cepat dan transparan.
3. Mengutuk keras segala teror terhadap KPK dalam bentuk apapun.

4. Menolak segala bentuk upaya pelemahan terhadap KPK termasuk menolak Rancangan UU KPK yang saat ini tengah disosialisasikan oleh DPR karena materinya bukan memperkuat tetapi cenderung melemahkan KPK.

Demikian pernyataan sikap Universitas Islam Indonesia, semoga impian kita untuk melihat Indonesia yang bebas dari korupsi dapat segera terwujud.

Yogyakarta, 11 April 2017  
Rektor Universitas Islam Indonesia

**Nandang Sutrisno, SH., LL.M., M.Hum., Ph.D.**